

**STRATEGI PEMBIAYAAN BANK UMUM SYARIAH PADA INDUSTRI
PERIKANAN MELALUI PENDEKATAN ANALISIS SWOT DAN ANP**

(Studi Kasus : Nelayan Dadap Kosambi, Kabupaten Tangerang)



Disusun oleh

MAGAH SUGANDA

NIM : 2018114520004

Dosen Pembimbing : Dr.Eng.Saiful Anwar,SE.Ak, M.Si, CA

PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER KEUANGAN SYARIAH

INSTITUT TEKNOLOGI & BISNIS AHMAD DAHLAN

JAKARTA

2020

ABSTRAK

STRATEGI PEMBIAYAAN BANK UMUM SYARIAH PADA INDUSTRI PERIKANAN MELALUI PENDEKATAN ANALISIS SWOT (*STRENGTHS WEAKNESSES OPPORTUNITIES THREATS*) DAN ANP (*ANALYTIC NETWORK PROCESS*) (Studi Kasus : Nelayan Dadap Kosambi, Kabupaten Tangerang)

Industri perikanan merupakan salah satu industri yang berpotensi untuk dikembangkan. Potensi perikanan Indonesia tergolong besar dan dapat dijadikan peluang dalam membangun industri pengolahan ikan. Oleh karena itu, penting untuk menelaah kebijakan pembiayaan bagi para nelayan tradisional. Padahal secara hitungan ekonomi sektor ini bisa menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara jika dikelola dengan baik

Dalam rangka pengembangan usaha dan investasi, permasalahan utama yang dihadapi adalah masih adanya keterbatasan dukungan permodalan usaha dari pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya kepada para nelayan / pembudidaya. Dalam kaitan ini, nelayan / pembudidaya ikan masih mengalami kesulitan mengakses permodalan atau kredit atau pembiayaan akibat terkendala oleh pemenuhan persyaratan prosedural perbankan.

Rendahnya kemampuan nelayan dalam memperoleh akses permodalan terutama dari lembaga keuangan perbankan, menyebabkan skala usaha penangkapan para nelayan kecil selama ini tidak mengalami peningkatan.

Bank Umum Syariah secara teori memiliki potensi yang sangat besar sebagai salah satu sumber pembiayaan pada sektor Perikanan. Karena Bank Umum Syariah memiliki potensi yang signifikan untuk pembiayaan industri perikanan karena inti bisnisnya adalah sebagai lembaga *intermediary*. Akan tetapi secara fakta menunjukkan bahwa ada kecenderungan Bank Umum Syariah kurang memiliki semangat untuk menyalurkan pembiayaan terhadap sektor perikanan.

Karakteristik industri perikanan yang mengandung banyak risiko dan yang menyebabkan minat Bank Umum Syariah untuk memberikan pembiayaan

masih sangat rendah. Sementara menurut pelaku usaha perikanan bahwa meminjam modal di Bank Umum Syariah sangat kompleks prosedurnya, sehingga kurang terdorong untuk mengajukan peminjaman modal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskusikan strategi dalam meningkatkan peran pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah dan mengetahui produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nelayan sehingga dapat memberikan solusi dan kontribusi keuangan dalam bidang Perikanan. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis SWOT (*Strengths Weaknesses Opportunities Threats*) dan metode *Analytic Network Process* (ANP) dengan teknik pengumpulan data observasi non participant, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah nelayan di Dadap Kosambi, Tangerang membutuhkan pembiayaan untuk permodalan terutama untuk perbaikan/pemeliharaan dan pembelian kapal serta alat tangkap. Secara umum rata-rata kebutuhan nelayan terhadap pembiayaan berkisar antara Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,-.

Adapun Produk Pembiayaan yang cocok untuk Industri Perikanan yaitu:

1. Pembiayaan Istishna adalah transaksi bai'al-istishna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli, Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.
2. Pembiayaan Ijarah Muntahiya biltamlik / Wa Iqtina adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa

Program penyuluhan, bimbingan teknis, dan pendampingan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) akan sangat membantu peningkatan kinerja perikanan.

Kata Kunci : *Strategi Pembiayaan, Lembaga Keuangan Syariah, Perikanan.*

ABSTRACT

SHARIA GENERAL BANK FINANCING STRATEGY IN THE FISHERY INDUSTRY THROUGH SWOT ANALYSIS APPROACH (STRENGTHS WEAKNESSES OPPORTUNITIES THREATS) AND ANP (ANALYTIC NETWORK PROCESS) (Case Study: Fisherman Dadap Kosambi, Regency of Tangerang)

The fishing industry is one industry that has the potential to be developed. The potential of Indonesian fisheries is relatively large and can be used as an opportunity in developing the fish processing industry. Therefore, it is important to examine the financing policies for traditional fishermen. Even though in economic terms this sector can be the biggest contributor to state revenue if managed properly

In the context of business development and investment, the main problem faced is the still limited business capital support from banks and other financial institutions for fishermen / cultivators. In this regard, fishermen / fish farmers still have difficulty accessing capital or credit or financing due to constraints on fulfilling banking procedural requirements.

The low ability of fishermen to get access to capital, especially from banking financial institutions, has caused the scale of business of catching small fishermen so far not to increase.

Sharia Commercial Banks in theory have huge potential as a source of funding in the fisheries sector. Because Islamic Commercial Banks have significant potential to finance the fishing industry because its core business is as an intermediary institution. However, the facts show that there is a tendency for Islamic Commercial Banks to lack the enthusiasm to channel financing to the fisheries sector.

The characteristics of the fishing industry that contain a lot of risks and that cause the interest of Islamic Commercial Banks to provide financing is still very low. Meanwhile, according to fishery business actors, that borrowing capital at a Sharia Commercial Bank is very complex in its procedures, making it less compelled to apply for capital loans.

The purpose of this study is to discuss strategies in increasing the financing role of Islamic Financial Institutions and find out financing products that are suitable to the needs of fishermen so that they can provide financial solutions and contributions in the field of Fisheries. The analytical method in this study uses the SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats) method and the Analytic Network Process (ANP) method with non-participant observation data collection techniques, interviews, questionnaires, and documentation.

The results of this study are fishermen in Dadap Kosambi, Tangerang need financing for capital, especially for repairs / maintenance and the purchase of boats and fishing gear. In general the average fishermen's need for financing ranges from Rp. 5,000,000 up to Rp. 50,000,000.

The Financing Products that are suitable for the Fishing Industry are:

1. Istishna Financing is a bai'al-istishna transaction which is a sales contract between the buyer and the maker of the goods. In this contract, the goods maker receives an order from the buyer, the goods maker then tries through another person to make or buy the goods according to the agreed specifications and sell them to the final buyer.
2. Ijarah Muntahiya Financing biltamlik / Wa Iqtina is a lease agreement for an item that ends with a transfer of ownership of the goods from the party giving the lease to the lessee

The extension program, technical guidance, and assistance by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia (KKP RI) will greatly help improve the performance of fishery financing

Keywords: Financing Strategy, Islamic Financial Institutions, Fisheries.

RINGKASAN EKSEKUTIF

STRATEGI PEMBIAYAAN BANK UMUM SYARIAH PADA INDUSTRI PERIKANAN MELALUI PENDEKATAN ANALISIS SWOT (*STRENGTHS WEAKNESSES OPPORTUNITIES THREATS*) DAN ANP (*ANALYTIC NETWORK PROCESS*) (Studi Kasus : Nelayan Dadap Kosambi, Kabupaten Tangerang)

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17,508 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 km dan memiliki luas wilayah sebesar 1,904,569 km².

Tidak terlalu berlebihan jika kita menilai bahwa sektor kelautan bisa menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Karena dua pertiga wilayah Indonesia adalah laut, maka potensi kelautan dan perikanan memang masih begitu besar namun sayangnya hingga kini belum tergarap optimal.

Dalam rangka pengembangan usaha dan investasi, permasalahan utama yang dihadapi adalah masih adanya keterbatasan dukungan permodalan usaha dari pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya kepada para nelayan/pembudidaya. Dalam kaitan ini, nelayan / pembudidaya ikan masih mengalami kesulitan mengakses permodalan atau kredit akibat terkendala oleh pemenuhan persyaratan prosedural perbankan.

Rendahnya kemampuan nelayan dalam memperoleh akses permodalan terutama dari lembaga keuangan perbankan, menyebabkan skala usaha penangkapan para nelayan kecil selama ini tidak mengalami peningkatan. Pengajuan kredit perbankan oleh nelayan biasanya selalu terhambat oleh masalah jaminan kredit.

Bukan pemerintah tidak ingin masyarakat nelayan hidup sejahtera, tetapi masalah budaya yang ada di masyarakat nelayan sangat kuat, sehingga menghambat proses untuk memecahkan masalah kemiskinan, dan akhirnya masyarakat nelayan masih dalam lingkaran kemiskinan, dan keberadaan masyarakat nelayan kadang kala terabaikan padahal secara hitungan ekonomi

sektor ini merupakan penyumbang terbesar pendapatan negara jika dikelola dengan baik. Permasalahan yang dihadapi oleh nelayan terutama yang terkait dengan permodalan adalah terkait dengan aksesibilitas terhadap lembaga keuangan.

Bahwa pengetahuan, pemahaman, dan akses masyarakat Indonesia terhadap lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan masih rendah dan tidak merata pada setiap sektor industri jasa keuangan

Bank Umum Syariah secara teori memiliki potensi yang sangat besar sebagai salah satu sumber pembiayaan pada sektor Perikanan. Karena Bank Umum Syariah memiliki potensi yang signifikan untuk pembiayaan industri perikanan karena inti bisnisnya adalah sebagai lembaga intermediary. Akan tetapi secara fakta menunjukkan bahwa ada kecenderungan Bank Umum Syariah kurang memiliki semangat untuk menyalurkan pembiayaan terhadap sektor perikanan.

Karakteristik industri perikanan yang mengandung banyak risiko dan yang menyebabkan minat Bank Umum Syariah untuk memberikan pembiayaan masih sangat rendah. Sementara menurut pelaku usaha perikanan bahwa meminjam modal di Bank Umum Syariah sangat kompleks prosedurnya, sehingga kurang terdorong untuk mengajukan peminjaman modal.

Karena penyaluran pembiayaan juga harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang menjadi acuan utama dalam kegiatan perbankan syariah. Kesesuaian ini tidak hanya pada penggunaan akad pembiayaan, tetapi juga pada objek dan tata cara penyaluran pembiayaan.

Berdasarkan permasalahan dan keragaman yang ada pada hasil observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi hasil penelitian ini akan menjelaskan tentang Bagaimana Strategi yang tepat untuk Mendapatkan Peningkatan Pembiayaan Bank Umum Syariah pada Industri Perikanan.

Industri perikanan merupakan salah satu industri yang berpotensi untuk dikembangkan. Potensi perikanan Indonesia tergolong besar dan dapat dijadikan peluang dalam membangun industri pengolahan ikan. Oleh karena itu, penting untuk menelaah kebijakan pembiayaan bagi para nelayan

tradisional. Padahal secara hitungan ekonomi sektor ini bisa menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara jika dikelola dengan baik

Dalam rangka pengembangan usaha dan investasi, permasalahan utama yang dihadapi adalah masih adanya keterbatasan dukungan permodalan usaha dari pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya kepada para nelayan / pembudidaya. Dalam kaitan ini, nelayan / pembudidaya ikan masih mengalami kesulitan mengakses permodalan atau kredit atau pembiayaan akibat terkendala oleh pemenuhan persyaratan prosedural perbankan.

Rendahnya kemampuan nelayan dalam memperoleh akses permodalan terutama dari lembaga keuangan perbankan, menyebabkan skala usaha penangkapan para nelayan kecil selama ini tidak mengalami peningkatan.

Bank Umum Syariah secara teori memiliki potensi yang sangat besar sebagai salah satu sumber pembiayaan pada sektor Perikanan. Karena Bank Umum

Syariah memiliki potensi yang signifikan untuk pembiayaan industri perikanan karena inti bisnisnya adalah sebagai lembaga *intermediary*. Akan tetapi secara fakta menunjukkan bahwa ada kecenderungan Bank Umum Syariah kurang memiliki semangat untuk menyalurkan pembiayaan terhadap sektor perikanan.

Karakteristik industri perikanan yang mengandung banyak risiko dan yang menyebabkan minat Bank Umum Syariah untuk memberikan pembiayaan masih sangat rendah. Sementara menurut pelaku usaha perikanan bahwa meminjam modal di Bank Umum Syariah sangat kompleks prosedurnya, sehingga kurang terdorong untuk mengajukan peminjaman modal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskusikan strategi dalam meningkatkan peran pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah dan mengetahui produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nelayan sehingga dapat memberikan solusi dan kontribusi keuangan dalam bidang Perikanan. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis SWOT (*Strengths Weaknesses Opportunities Threats*) dan metode *Analytic Network Process* (ANP) dengan teknik pengumpulan data observasi non participant, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah nelayan di Dadap Kosambi, Tangerang membutuhkan pembiayaan untuk permodalan terutama untuk perbaikan/pemeliharaan dan pembelian kapal serta alat tangkap. Secara umum rata-rata kebutuhan nelayan terhadap pembiayaan berkisar antara Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,-.

Adapun Produk Pembiayaan yang cocok untuk Industri Perikanan yaitu:

1. Pembiayaan Istishna adalah transaksi bai'al-istishna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli, Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.
2. Pembiayaan Ijarah Muntahiya biltamlik / Wa Iqtina adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa

Program penyuluhan, bimbingan teknis, dan pendampingan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) akan sangat membantu peningkatan kinerja pembiayaan perikanan

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17,508 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 km dan memiliki luas wilayah sebesar 1,904,569 km². (kcp.go.id diunduh 10 Januari 2020)

Sebagai gambaran Produksi Perikanan Tangkap dari tabel 1 menurut data Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang terdapat dipulau Jawa yaitu terdiri dari 6 Provinsi setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Jika diperhitungkan secara Nasional tentu potensi perikanan tangkap sangat besar sekali.

TABEL 1

Produksi Perikanan Tangkap Menurut Provinsi di pulau Jawa dan Subsektor (ton), 2013-2017

Provinsi	Perikanan Laut				
	2013	2014	2015	2016	2017
DKI Jakarta	209.733	226.060	289.214	143.640	135.619
Jawa Barat	207.462	206.156	271.332	218.194	231.153
Jawa Tengah	224.229	242.072	336.047	334.298	253.614
DI Yogyakarta	3.396	5.387	3.918	3.254	5.315
Jawa Timur	378.329	385.878	402.569	390.271	551.925
Banten	58.568	59.302	68.006	52.445	108.703
Indonesia	5.707.012	6.037.654	6.204.668	6.115.469	6.603.631

Sumber : Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Potensi besar kelautan Indonesia masih belum memberikan kontribusi yang cukup berarti dan belum mampu mengangkat kehidupan nelayan, karena memiliki berbagai permasalahan yang dihadapi dan banyak dialami.

Produksi perikanan Indonesia tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 1,55 persen dibandingkan tahun 2017, terdiri dari perikanan tangkap yang mengalami pertumbuhan sebesar 1,64 persen dan perikanan budidaya mengalami pertumbuhan sebesar 1,53 persen. Pertumbuhan perikanan tangkap tahun 2018 sebesar 1,64

persen disumbangkan oleh pertumbuhan perikanan tangkap di laut sebesar 1,80 persen dan pertumbuhan perikanan tangkap di perairan umum yang melambat sebesar 0,56 persen.

TABEL 2
RINCIAN PRODUKSI PERIKANAN TRIWULANAN TAHUN 2018

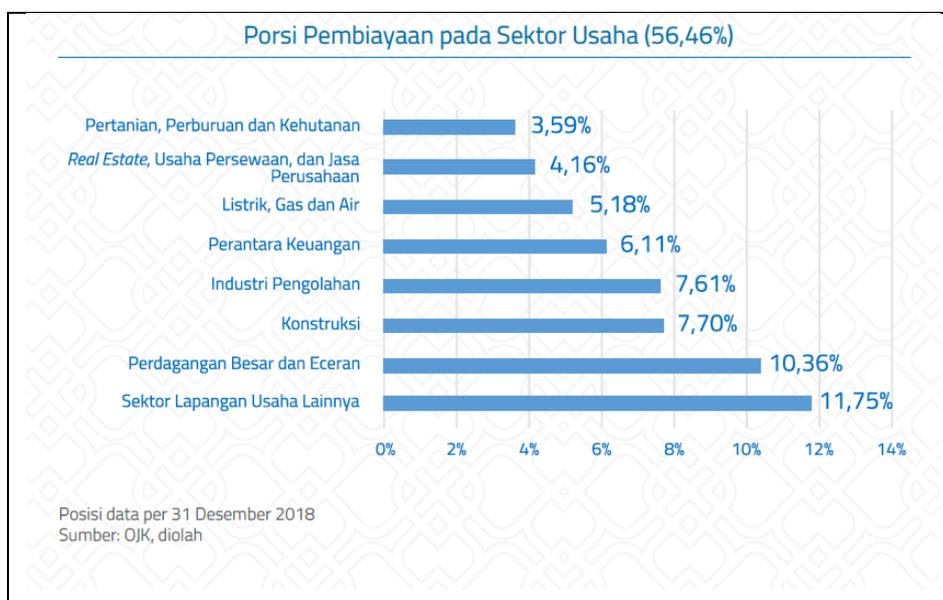
KOMODITAS	2016	2017	2018*
Perikanan Indonesia	22,582,510	23,006,926	24,496,681
Perikanan Tangkap	6,580,191	6,891,935	7,248,297
Perikanan Tangkap-Laut	6,115,469	6,424,114	6,716,050
Perikanan Tangkap-Umum	464,722	467,821	532,247
Perikanan Budidaya	16,002,319	16,114,991	17,248,384

Sumber : Aplikasi satudata KKP 2019, diakses pada tgl 16 Januari 2020

Karakteristik industri perikanan yang mengandung banyak risiko dan yang menyebabkan minat Bank Umum Syariah untuk memberikan pembiayaan masih sangat rendah. Dan menurut pelaku usaha bahwa meminjam modal di Bank Umum Syariah sangat kompleks prosedurnya, sehingga kurang terdorong untuk mengajukan peminjaman modal.

Grafik 1

Porsi Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah per Sektor Usaha, 2018



[https://www.ojk.go.id/id/SitePages/search.aspx? kpembiayaan syariah sektor ekonomi 2018](https://www.ojk.go.id/id/SitePages/search.aspx?kpembiayaan_syariah_sektor_ekonomi_2018) diakses pada tgl 16 Januari 2020

Berdasarkan grafik diatas sektor perikanan, perburuan dan kehutanan, perbankan syariah telah menyalurkan 3,59% dari total 58,46 % pada sektor usaha, bukan lapangan usaha (rumah tangga) 41,73% dan bukan lapangan usaha lainnya 1,81%.

Penelitian ini memiliki harapan yang kuat untuk ikut serta dalam memajukan pemerataan ekonomi nasional, keuntungannya dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat, yaitu Lembaga Keuangan Syariah atau Bank Umum Syariah memiliki andil yang kuat dalam menciptakan tercapainya kesejahteraan nelayan, yang erat kaitannya dengan prinsip bagi hasil yang berkeadilan tanpa menerapkan riba yang digunakan dalam operasionalnya.

Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Rendahnya minat Bank Umum Syariah dalam penyaluran pembiayaan ke sektor perikanan.
2. Pelaku usaha sektor perikanan merupakan rumah tangga nelayan di pesisir yang kondisinya memprihatinkan.
3. Kesulitan aksesibilitas Nelayan terhadap Lembaga Keuangan untuk mendapatkan modal.

Batasan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat pembatasan ruang lingkup penelitian agar dapat dilakukan lebih mendalam dan memecahkan masalah. Untuk itu, penelitian ini dibatasi pada:

1. Analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats) melalui evaluasi lingkungan yang berkaitan dengan penelitian.
2. Metode ANP (Analytic Network Process) menggunakan analisis kebutuhan untuk mengetahui perbedaan yang terjadi antara harapan dan keinginan yang terjadi di lapangan.
3. Bank Umum Syariah yang dimaksud adalah hanya terbatas pada Bank Umum Syariah yang ada atau yang terdekat di daerah, Nelayan Dadap Kosambi, Kabupaten Tangerang.
4. Obyek penelitian hanya pada Nelayan Tambak, Nelayan Tradisional di daerah Nelayan Dadap Kosambi, Kabupaten Tangerang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan dan keragaman yang ada pada hasil observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi hasil penelitian ini akan menjelaskan tentang Bagaimana Strategi yang tepat untuk Mendapatkan Peningkatan Pembiayaan Bank Umum Syariah pada Industri Perikanan yang disusun berdasarkan rumusan dibawah ini :

1. Produk Pembiayaan apakah yang cocok untuk Industri Perikanan?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi Bank Umum Syariah kurang berminat untuk memberikan pembiayaan terhadap Industri Perikanan?
3. Bagaimanakah cara akses Nelayan dalam mengajukan permohonan di lembaga keuangan syariah?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam uraian sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis kebutuhan pembiayaan bagi nelayan dan industri perikanan.
2. Mengidentifikasi produk pembiayaan Bank Umum Syariah yang cocok bagi industri perikanan
3. Mengetahui strategi peningkatan pembiayaan syariah bagi industri perikanan.

Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Peneliti, sebagai bahan pembelajaran, menambah wawasan dan pengalaman dalam mencari solusi permasalahan kebutuhan pembiayaan nelayan dan industri perikanan.
2. Bank Umum Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah, memberikan solusi produk pembiayaan yang cocok bagi industri perikanan.
3. Peneliti lain atau masyarakat, dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk suatu program atau kebijakan dan dapat juga sebagai pembanding ataupun pustaka untuk penelitian sejenis.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Strategi

Strategi adalah suatu yang dirancang dan disiasati secara cermat agar memberi hasil atau keuntungan. Dalam suatu perusahaan strategi selalu “*memberi hasil yang lebih baik*”, sehingga jika proses manajemen pada perusahaan tidak memberikan hasil yang lebih baik maka proses manajemen tersebut tidak dapat disebut Manajemen Strategi.¹

Yang dimaksud Strategi jika dalam Islam mengandung makna pengelolaan agar menjadi lebih baik, dalam koridor kebenaran sesuai syariah, mengandung kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Manajemen Strategi

Manajemen Strategi terbentuk dari 2 suku kata yaitu manajemen dan strategi, dimana manajemen strategi merupakan ilmu dalam membuat (formulating), menerapkan dan mengevaluasi keputusan-keputusan strategi antar fungsi-fungsi manajemen yang memungkinkan sebuah organisasi mempunyai tujuan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan dimana organisasi itu berada. Dalam hal ini manajemen strategi mencakup aliran keputusan, cara-cara membentuk strategi, membuat keputusan design serta program perusahaan dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif.²

¹Abdul Halim Usman, *Manajemen Strategi Syariah, Terori, Konsep & Aplikasi*, Cetakan I, (Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2015), h. 20

²Abdul Halim Usman, *Manajemen Strategi Syariah, Terori, Konsep & Aplikasi*, Cetakan I, (Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2015), h. 5

Perbankan Syariah dan Kelembagaannya

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.

Pada dasarnya Lembaga Keuangan Syariah merupakan sistem yang sangat sesuai dengan ajaran agama Islam yaitu adanya larangan riba dan gharar. Karena pedoman lembaga keuangan syariah dalam operasinya berdasarkan pada Al-Quran dan Hadist.

Produk Pembiayaan

1. Pembiayaan konsumtif, yakni pembiayaan yang diberikan untuk pembelian ataupun pengadaan barang tertentu yang digunakan untuk tujuan usaha.
2. Pembiayaan Produktif, yakni pembiayaan yang diberikan kebutuhan usaha. Pembiayaan Produktif terdiri dari dua, yaitu Pembiayaan Investasi dan Pembiayaan Modal Kerja.

Pembiayaan dengan prinsip syariah yaitu meliputi:

1. *Prinsip Bagi Hasil* yaitu : Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah
2. *Prinsip Jual Beli (Piutang)* yaitu : Pembiayaan Bai'al Murabahah , Pembiayaan Salam, Pembiayaan Istishna
3. *Prinsip Sewa*, yaitu: Pembiayaan Ijarah, Pembiayaan Ijarah Muntahiya biltamlik / Wa Iqtina

Risiko Pembiayaan

Risiko Pembiayaan adalah sebuah risiko kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Risiko pembiayaan kadang-kadang merujuk pada risiko kredit apabila menggunakan istilah yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Nomor 13/23/PBI/2011.³

Sumber Daya Perikanan Dan Kelautan

Indonesia memiliki panjang pantai sekitar 81.000 KM, terdiri dari sekitar 17,51 ribu pulau dengan dengan potensi lahan tambak 840,000 Ha. Di samping itu, Indonesia memiliki wilayah laut yang luasnya sekitar 5,8 juta Km² dengan dugaan potensi perikanan sebesar 6,10 juta ton per tahun.

Mata Pencaharian Nelayan

Mata pencaharian merupakan aktivitas manusia untuk taraf hidup yang layak dimana diantara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya tentu berbeda, sesuai dengan taraf kemampuan penduduk dan keadaan demografinya.

Risiko Usaha Perikanan

Pada dasarnya setiap kegiatan usaha pasti memiliki risiko, baik besar maupun kecil termasuk pada usaha perikanan. Baik usaha perikanan tangkap maupun usaha perikanan budi daya, karena sangat tergantung pada kondisi alam dan cuaca atau musim.

Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Usaha Perikanan

Kriteria yang paling diutamakan adalah 5 C (character (watak), capacity (kemampuan), condition (kondisi), dan penunjangnya capital (modal) dan colateral (jaminan)).

³ M Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah (Suatu Pengantar)*, Cetakan I, (Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia, 2018), h. 88

Produk Pembiayaan Bagi Nelayan dan Perikanan

Pembiayaan dengan prinsip syariah yaitu meliputi :

- a) Prinsip Bagi Hasil yaitu, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah
- b) Prinsip Jual Beli (Piutang) yaitu, Pembiayaan Bai'al Murabahah, Pembiayaan Salam, Pembiayaan Istishna
- c) Prinsip Sewa yaitu, Pembiayaan Ijarah, Pembiayaan Ijarah Muntahiya biltamlik / Wa Iqtina

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian dan Sumber Data

Kuesioner terdiri dari kuesioner untuk analisis SWOT dan kuesioner untuk analisis ANP. Pertanyaan dalam kuesioner SWOT berupa identifikasi faktor-faktor strategis..

Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal Peluang (*opportunities*) dan Ancaman (*treath*) dengan faktor internal Kekuatan (*strengths*), dan Kelemahan (*weaknesses*).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan didaerah Nelayan Dadap Kosambi, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten pemilihan ini dilakukan secara sengaja. Penelitian ini dilaksanakan Mulai bulan Januari 2020.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan yaitu pengambilan sampel non acak (disengaja). Dalam metode ANP.

No	Kriteria Responden	Jenis Responden	Jumlah	Keterangan
1	Praktisi Nelayan	Nelayan tangkap Nelayan budidaya	1 orang 1 orang	1 orang nelayan tradisional, 1 orang

				budidaya tambak laut
2	Praktisi Perbankan Syariah	Divisi Pembiayaan Bank Umum Syariah	2 orang	2 Bank Umum Syariah
3	Pakar dan pemerhati (Aktivis)	Dosen Pasca Sarjana Keuangan Syariah	2 orang	1 orang Dosen dan 1 orang Pemerhati (Aktivis) Perikanan

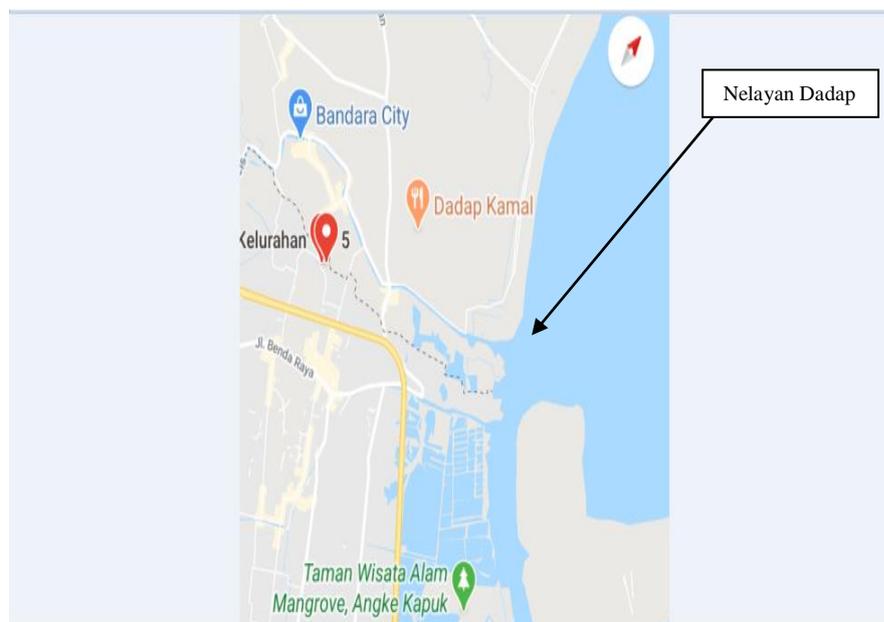
HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Nelayan Dadap Kosambi

Kondisi Geografis

Penelitian ini dilakukan di Nelayan Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten yang merupakan salah satu pesisir yang ada di wilayah Tangerang.

Peta Wilayah



Nelayan Dadap Kamal diakses melalui google pada tgl 09 Februari 2020



KotaKita.com peta kecamatan Kosambi diakses pada tgl 09 Februari 2020

Kondisi Perkenomian Penduduk

Jumlah penduduk adalah 167.446 (2017) dengan kepadatan 3.560 jiwa /km², Desa / Kelurahan terdapat 7 desa dan 3 kelurahan. Luas wilayah Kecamatan 29,76.

Kondisi Nelayan

Padahal permodalan merupakan suatu harapan bagi nelayan untuk dapat mengembangkan usaha dan memperbaiki taraf hidup. Namun para Nelayan Dadap Kosambi, kesulitan melintas untuk melaut dan untuk pulang ke rumah karena saat melintas di Muara Dadap terdapat aktivitas pembangunan jembatan reklamasi

Bank di kecamatan Kosambi diantaranya, yaitu :

1. Mandiri Micro Business Unit Tangerang Mutiara Kosambi
2. Bank Index KCP Dadap
3. Bank BRI Unit Dadap
4. Bank Mandiri Mutiara Kosambi – Kawasan Pergudangan.
5. Bank BCA Komplek Pergudangan Mutiara Kosambi

6. Bank Syariah Mandiri di dekat Kecamatan Kosambi.

Hasil dan Analisis SWOT

Hasil dari penelitian ini adalah nelayan di Dadap Kosambi, Tangerang membutuhkan pembiayaan untuk permodalan terutama untuk perbaikan/pemeliharaan dan pembelian kapal serta alat tangkap. Secara umum rata-rata kebutuhan nelayan terhadap pembiayaan berkisar antara Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,-.

Adapun Produk Pembiayaan yang cocok untuk Industri Perikanan yaitu:

1. Pembiayaan Istishna adalah transaksi bai'al-istishna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli, Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.
2. Pembiayaan Ijarah Muntahiya biltamlik / Wa Iqtina adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa

Program penyuluhan, bimbingan teknis, dan pendampingan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) akan sangat membantu peningkatan kinerja pembiayaan.